

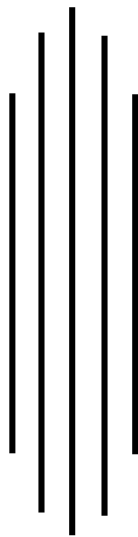


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

**PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGHUBUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



**JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana akhirnya Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2020 pada Badan Penghubung memuat program dan kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang terjadi dalam Tahun berjalan yang akan dilaksanakan pada semester ke-2 (Juli – Desember 2020). Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2020.

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DI JAKARTA**



ARIE PRIMAJAYA,SE,M.Si
NIP.19751231 200312 1 007

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak Tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa dalam merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Badan Penhubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan. Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya.

Pembuatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diperlukan agar program yang akan dibuat ke depan terarah dan sesuai dengan arah kebijakan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta serta mengacu pada arah kebijakan pusat. Oleh karena itu Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta memandang Renja ini sebagai hal yang sangat penting untuk dilaksanakan demi kelancaran kegiatan dimasa yang akan datang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi Renja Perubahan

Maksud Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SKPD terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat tahunan yang telah disusun pada

tahun 2020. Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2020 tetap menjadi bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022.

Tujuan Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 bertujuan untuk :

1. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan
2. Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2020 adalah sebagai pedoman OPD Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2020.

Dalam hal ini maksud dari Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun. Secara substansial memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaannya difokuskan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2020.

Renja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan OPD sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2020 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta saat ini, agar pelayanan penyelenggaraan pelayanan pada Badan Penghubung dapat maksimal / berjalan lancar. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2020 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri F);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A).

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja OPD

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-Perubahan OPD) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan Renja.
- BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020. Berisi tentang evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan s.d. triwulan II Tahun 2020 dan permasalahan yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- BAB III Rencana Perubahan Program dan Kegiatan. Berisi tentang rencana perubahan program dan kegiatan Tahun 2020.
- BAB IV Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2017 – 2022 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, maka sasaran prioritas pembangunan pada meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

Kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2017-2022 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, yang menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017-2022. Ada 2 (dua) program yang telah ditetapkan untuk dapat dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan masing-masing program tersebut direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan disahkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada setiap tahun anggaran.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan direalisasikan pada tahun 2019 sesuai dengan pagu anggaran yang ada dan telah ditetapkan dalam renja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tahun 2019 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Penghubung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Jakarta Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD PERUBAHAN	FISIK	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.140.740.040,00	4.143.740.040,00	100	3.175.190.252,00	83,04	968.549.788,00	23,37
A	GAJI DAN TUNJANGAN	1.793.412.040,00	1.796.412.040	100	1.488.766.252	82,87	307.645.788	17,13
B	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2.347.328.000	2.347.328.000	100	1.686.424.000	71,84	660.904.000	28,16

Tabel 2
Realisasi Belanja Langsung Badan Penghubung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Jakarta Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD PERUBAHAN	FISIK	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	BELANJA LANGSUNG	11.080.937.000,00	15.079.747.000,00	166,67	11.908.718.215,00	78,97	3.171.028.785,00	21,03
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	7.076.965.000,00	12.863.352.500,00	100,00	10.118.100.233,00	78,66	2.745.252.267,00	21,34
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.291.390.000	5.747.577.500	100,00	4.873.986.074	84,80	873.591.426	15,20
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.656.525.000	7.006.725.000	100,00	5.207.263.959	74,32	1.799.461.041	25,68
3	Peningkatan Disiplin Aparatur							
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.450.000	100.450.000	100,00	34.150.200	34,00	66.299.800	66,00
5	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	2.200.000	2.200.000	100,00	400.000	18,18	1.800.000	81,82
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.400.000	6.400.000	100,00	2.300.000	35,94	4.100.000	64,06
7	Pembelian Lahan untuk Asrama Mahasiswa Bangka Belitung							
8	Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan Untuk Rehabilitasi Berat Asrama Dayang Putri Bangka belitung di Yogyakarta	50.187.500		0,00	0	0,00	0	0,00

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD PERUBAHAN	FISIK	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi	4.003.972.000,00	2.216.394.500,00	66,67	1.790.617.982,00	80,79	425.776.518,00	19,21
1	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah	619.824.000	529.824.000	100,00	388.719.000	73,37	141.105.000	26,63
2	Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Perantauan							
3	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.933.000	94.933.000	100,00	61.462.164	64,74	33.470.836	35,26
4	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	1.393.450.000	1.341.450.000	100,00	1.240.446.818	92,47	101.003.182	7,53
5	Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan							
6	Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	1.286.565.000	250.187.500	100,00	99.990.000	39,97	150.197.500	0,00
7	Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
8	Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	564.200.000	564.200.000	100,00	446.828.555	79,20	117.371.445	20,80
9	Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	45.000.000	45.000.000	100,00	15.800.000	35,11	29.200.000	64,89

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, maka Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta menyadari bahwa masih ada kelemahan / kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed *back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- **Alokasi dan Realisasi APBD 2019**

Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Pada tahun 2019, anggaran Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta pada APBD adalah sebesar Rp 15.271.864.540,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.140.740.040,00 sedangkan belanja langsung sebesar Rp11.131.124.500,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2019, anggaran Badan Penghubung menjadi sebesar Rp19.832.687.040,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp4.143.740.040,00 sedangkan belanja langsung sebesar Rp15.688.947.000,00 (mengalami kenaikan sebesar Rp4.560.822.500,00 dan belanja langsung sebesar Rp4.557.822.500,00 sedangkan belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000,00). Total Realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar Rp15.546.537.022,00 atau 78,39 persen, dengan sisa anggaran sebesar Rp4.286.150.018,00 atau 21,61 persen yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung Rp3.175.190.252,00 atau 76,63 persen dan Belanja Langsung Rp12.371.346.770,00 atau 78,85 persen.

A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019 urusan pemerintahan dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp15.271.864.540,00. Dalam APBD perubahan mengalami perubahan sebesar Rp19.832.687.040,00. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp15.546.537.022,00 atau 78,66 persen, dengan sisa anggaran sebesar Rp4.286.150.018,00 atau 21,34 persen.

Outcome yang dihasilkan pada pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan antara lain:

I. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada APBD 2019 sebesar Rp 7.076.965.000,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2019, anggaran menjadi Rp 12.863.352.500,00 (mengalami penambahan sebesar Rp 5.786.387.500) dengan 5 kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp 10.118.100.233,00 atau 49,45 persen, dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.745.252.267,00 atau 14,04 persen.

Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Pelayanan Pemerintah adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan dan Predikat Sakip Badan Penghubung dengan nilai 76,62.

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output kegiatan : Jumlah Pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang Terlayani 65 orang.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Output kegiatan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100%.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Output kegiatan : Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 35 orang.

4. **Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah**

Output kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% terdiri dari 3 dokumen.

5. **Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Output kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah 5 laporan.

II. Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provins pada APBD sebesar Rp 4.003.972.000,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2019 anggaran menjadi Rp 2.216.394.500,00 (mengalami pengurangan sebesar Rp 1.787.577.500) dengan 6 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.790.617.982,00 atau 80,79 persen dengan sisa anggaran sebesar Rp 425.776.518,00 atau 19,21 persen.

Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi adalah Tersedianya bahan dan materi untuk informasi, promosi, sarana prasarana yang representatif bagi tugas pelayanan kedinasan, pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah oleh **Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 619.824.000 dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 529.824.000 realisasi anggaran sebesar Rp 388.719.000 atau 73,37% . Keluaran kegiatan adalah Jumlah Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek, 22 kali.

2. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya dilaksanakan oleh **Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 94.933.000 realisasi anggaran sebesar Rp 61.462.164 atau 64,74%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 11 kali.
3. Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat dengan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp 1.393.450.000 realisasi anggaran sebesar Rp 1.240.446.818 atau 92,47%. Kegiatan tersebut direncanakan untuk Jumlah kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat sebanyak 4 acara.
4. Kegiatan Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini dilaksanakan oleh **Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta** dengan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp 250.187.500 realisasi anggaran sebesar Rp 99.990.000 atau 39,97%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Belanja Rehabilitasi Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 1 paket.
5. Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah dilaksanakan oleh **Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 564.200.000 realisasi anggaran sebesar Rp 446.828.555 atau 79,20%. Keluaran kegiatan adalah Meningkatnya Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi, 100%.
6. Kegiatan Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik dilaksanakan oleh **Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp 15.800.000 atau 35,11%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Peliputan Kegiatan dalam Rangka Kehumasan dan Keprotokolan melalui Media Massa dan Elektronik, 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Badan Penghubung dengan nama sebelumnya Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jakarta awalnya dikenal sebagai Kantor Penghubung di bentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang kemudian diperkuat oleh Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 12 Januari 2003, yang selanjutnya mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Kepulauan melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Kemudian Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

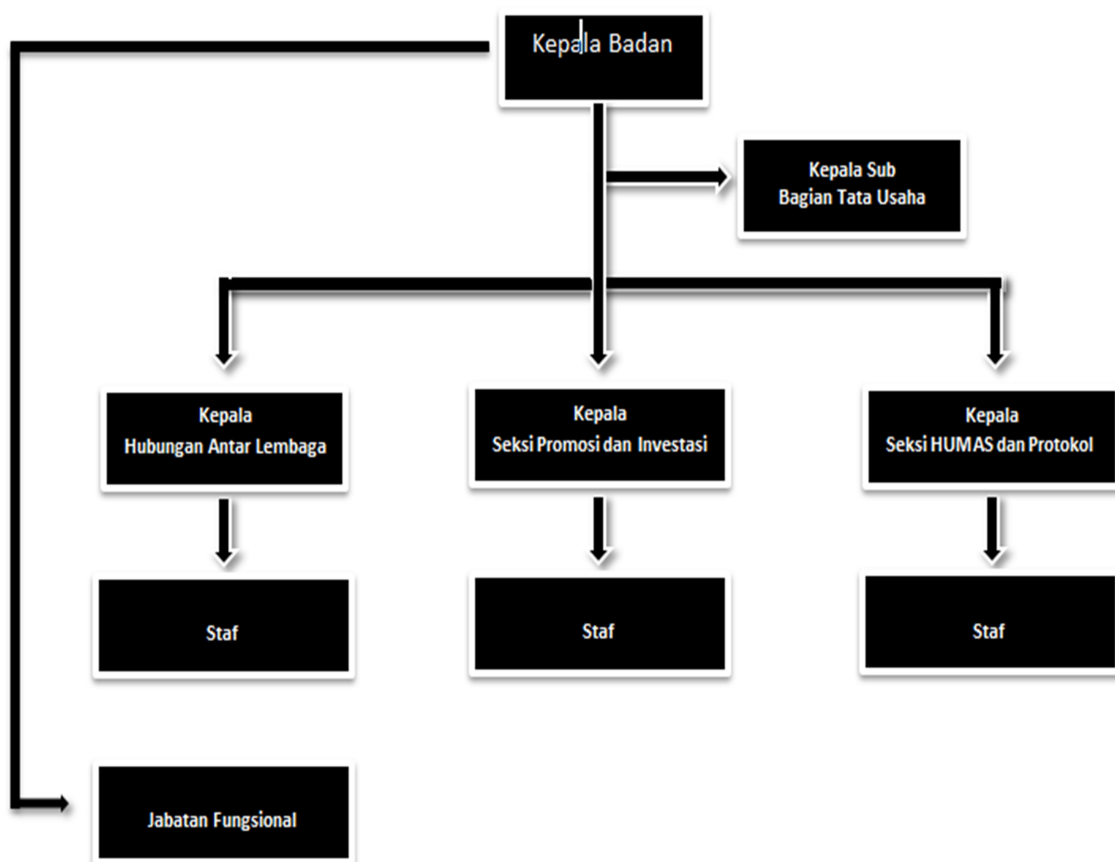
2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja pada Badan Daerah) adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan Penghubung
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Kepala Seksi Promosi dan Investasi
- 4) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
- 5) Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Protokol
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi

Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta



2. Sumber Daya Aparatur Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

A. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini OPD Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta didukung oleh pegawai sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang dengan status kepegawaian 26 (dua puluh enam) orang PNS, dan 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Harian Lepas (PHL) (data per 31 Desember 2019). Adapun para pegawai ada yang ditempatkan di Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan ada pula yang ditempatkan di Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Tabel 3

**KLASIFIKASI PNS DAN CPNS
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DI JAKARTA
BERDASARKAN TINGKAT ESELON (PER DES 2019)**

NO.	ESSELON	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH
1.	II A	-	-	-
2.	II B	-	-	-
3.	III A	1	-	1
4.	III B	-	-	-
5.	IV A	4	-	4
6.	IV B	-	-	-
7.	Non Esselon	9	10	19
8.	Fungsional	-	2	2
	JUMLAH	14	12	26

Tabel 4

**KLASIFIKASI PNS DAN CPNS
BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (PER DES 2018)**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Doktoral / S-3	-	-	-
2.	Pasca Sarjana / S-2	4	1	5
3.	Sarjana / S-1	4	8	12
4.	Diploma –IV	-	-	-
5.	Diploma-III	1	3	4
6.	Diploma -I/II	-	-	-
7.	SLTA	5	-	5
8.	SLTP		-	-
9	SD	-	-	-
	JUMLAH	14	12	26

1. Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran

Prasarana gedung Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta saat ini yang berlokasi di Jalan Kedondong Raya Nomor 13 Rawamangun Jakarta Timur belum cukup representatif baik dilihat dari bangunan maupun dari segi lansekap atau tata ruang. Hal ini menjadi kendala karena ruang yang ada terlalu sempit dan tidak mencukupi untuk menampung 63 (enam puluh tiga) orang pegawai. Selain itu gedung kantor tersebut berada di lokasi pemukiman penduduk yang juga sebelumnya digunakan sebagai Mess Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga sangat perlu dicari alternatif gedung kantor lain yang lebih representatif dan lebih memenuhi persyaratan sebagai kantor untuk meningkatkan fungsi dan tugas pelayanan dari Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Selain itu Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta juga membawahi Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. Dalam hal sarana di Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sudah tersedia cukup memadai dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.

Sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta antara lain:

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	13 Unit
2	Kendaraan roda 2	4 Unit
3	Komputer yang dapat digunakan	12 Unit
4	Laptop yang dapat digunakan	8 Unit
5	iPad	2 Unit
6	AC yang dapat digunakan	23 Unit

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 maka Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi. Dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta;
2. Memberikan sarana kelancaran pelayanan administrasi, informasi, keprotokolan, transformasi, sarana dan prasarana;
3. Meningkatkan bahan informasi, promosi dan investasi serta kelengkapan barang-barang seni budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Meningkatkan pemanfaatan anjungan daerah dan pementasan seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai show window budaya daerah Bangka Belitung

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat

dilihat dari komponen yang menjadi tolok ukur yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas dan professional. Tugas-tugas pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak kegiatan yang diikuti dan difasilitasi oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Hal ini semakin dapat menunjukkan peran penting dari Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta walaupun dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki tetapi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta antara lain :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

- 1.1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu indikator terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas terhadap Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Dengan target predikat 71.

- 1.2. Predikat Sakip Badan Penghubung

Dengan target predikat 70.

2. Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi perlunya ditingkatkan lagi tersedianya bahan dan materi untuk informasi, promosi, sarana prasarana yang representatif bagi tugas pelayanan kedinasan, pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan capaian kinerja yang dicapai Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam melaksanakan urusan pemerintahan tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti Pusat, Regional, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait. Capaian Kinerja yang diraih diantaranya :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai predikat 78,24%.
2. Meningkatnya Predikat Sakip Badan Penghubung dengan nilai 76,62.

3. Meningkatnya ketersediaan bahan dan materi untuk informasi, promosi, sarana prasarana yang representatif bagi tugas pelayanan kedinasan, pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD untuk lima tahunan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka telah disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung sebagaimana terdapat di dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan tersebut dalam renstra SKPD, selain didasarkan pada kebutuhan pegawai juga didasarkan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan / diatur dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tahun 2019 dan 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam rancangan awal RKPD melalui forum SKPD dan Musrenbang, sehingga tidak ada jenis program dan kegiatan yang baru/berbeda. Adanya perbedaan dari jumlah anggaran yang diusulkan dan yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat dalam program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, penetapan program dan kegiatan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, hanya mengacu pada Program dan Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan nasional (Pemerintah Pusat) dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari para Pemangku Kepentingan, seperti LSM, asosiasi-asosiasi, ataupun Perguruan Tinggi maupun SKPD Kabupaten/Kota.

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sampai dengan triwulan II, maka Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Adapun evaluasi pelaksanaan renja SKPD sampai dengan Triwulan II, yang memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel.

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020, yang terdiri dari 2 program dan 11 kegiatan, Penyerapan keuangan program/kegiatan Triwulan II Renja Badan Penghubung Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.486.205.486 (13,36%). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah yang terdiri dari 5 kegiatan, capaian realisasi anggaran Dalev Triwulan II 48%, Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan.
- b. Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi yang terdiri dari 6 kegiatan, capaian realisasi anggaran kinerja sebesar 1,93%.

Prosentase fisik pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan pada Triwulan II, sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 36,60%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23,81%
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,53%
4. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah 0%
5. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0%

B. Program Peningkatan promosi, Informasi dan Pelayanan serta Hubungan antar Lembaga

1. Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah 76,81%
2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 204,44%
3. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 11,44%
4. Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah 18,67%
5. Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik 0%

Prosentase realisasi kemajuan fisik secara keseluruhan adalah 37,33%

Hal ini sesuai dengan rencana kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Kegiatan pada program ini semua merupakan kegiatan pendukung tupoksi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam rangka penyelenggaraan fungsi tugasnya. Adapun realisasi kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam format dalam Evaluasi Hasil terhadap Renja badan Penghubung Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut : **(terlampir)**

Selanjutnya untuk melihat laporan kemajuan program / kegiatan rencana pelaksanaan pembangunan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka melaksanakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, maka telah ditetapkan kebijakan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi tersebut, maka telah ditetapkan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Secara teknis kedua kebijakan tersebut dilengkapi dengan berbagai pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 s.d 15 Tahun 2011.

Tujuan ditetapkannya kebijakan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Inti dari reformasi birokrasi adalah kemauan untuk bekerja keras menciptakan sebuah perubahan tata kelola pemerintahan yang baik yang berujung pada penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik dengan menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

Sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi, maka berdasarkan salah satu misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2012 – 2017, yaitu ***“Perwujudan Good Governance dan Clean Government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung”***, telah ditetapkan strategi dan kebijakan daerah yang dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan *good governance* dan *clean government* serta adanya kesepakatan semua pihak baik pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif serta masyarakat mulai tahun 2007 dan seterusnya, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya.

2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Aparatur Pemerintah secara terus menerus serta pemberian “*Reward and Punishment*” sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip adil dan merata.
3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan publik yang berbasis *good governance* dan *clean goverment*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang berfungsi untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi atau lembaga. Dari tujuan akan tampak kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi/lembaga dalam melaksanakan misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun.

Tujuan organisasi atau lembaga haruslah konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi/lembaga. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi/lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi lembaga serta visi dan misi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam membantu pelayanan Pemerintah Daerah/Gubernur dalam lingkup tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2017- 2022 yaitu :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta;
- 2) Meningkatkan jumlah bahan promosi dan informasi, kualitas pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas dan professional;
2. Tersedianya bahan dan materi untuk informasi, promosi, sarana prasarana yang representatif bagi tugas pelayanan kedinasan, pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Yang Mengalami Perubahan Pergeseran.

Secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk Tahun Anggaran 2020 adalah :

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU	JUMLAH KEGIATAN BARU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3	13=8-6	14
1.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	2	2	14	14	9	101.870.692.500	12.698.483.540	6.144.442.698	-	-	
Dst.													
JUMLAH		2	2	2	14	14	9	101.870.692.500	12.698.483.540	6.144.442.698	-	-	

Untuk perubahan Tahun Anggaran 2020, sebagai implementasi dari Renstra yang akan disusun tahun 2017-2022, sesuai Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang akan disusun, maka untuk mencapai sasaran yang ada, telah direncanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dananya berasal dari APBD. Selanjutnya rencana program dan kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2020
Badan Penghubung**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-																		
0.00.4.06.04.008	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah									6.151.603.540	5.775.967.844	(375.635.696)						
0.00.4.06.04.008.006	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	6 Laporan	4 Laporan	26.200.000	25.975.000	(225.000)	-	-	5 Laporan	120.000.000	berjalan	
0.00.4.06.04.008.005	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	26.400.000	12.875.000	(13.525.000)	-	-	3 Dokumen	110.000.000	berjalan	

0.00.4.06.04.008.003	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya	-		SKPD	SKPD	65 Orang	0 Orang	142.005.000	-	(142.005.000)	-	-	180 Orang	-	berjalan	
0.00.4.06.04.008.004	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkatkan kapasitasnya	-		Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	33 Orang	2 Orang	245.165.000	11.828.140	(233.336.860)	-	-	38 Orang	1.000.000.000	berjalan	
0.00.4.06.04.008.002	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	100%	100%	588.525.000	572.429.360	(16.095.640)	-	-	100%	1.200.000.000	berjalan	
0.00.4.06.04.008.001	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang Terlayani	Jumlah Pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang Terlayani	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	65 Orang	65 Orang	5.123.308.540	5.152.860.344	29.551.804	-	-	71 Orang	4.257.598.448	berjalan	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																		
4.05.4.06.04.036	Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi									6.546.880.000	368.474.854	(6.178.405.146)						
4.05.4.06.04.036.000	Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	Jumlah Peliputan Kegiatan dalam Rangka Kehumasan dan Keprotokolannya melalui Media Massa dan Elektronik	Jumlah Peliputan Kegiatan dalam Rangka Kehumasan dan Keprotokolannya melalui Media Massa dan Elektronik	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	12 kali	0 kali	50.500.000	-	(50.500.000)	-	-	12 kali	300.000.000	berjalan	

4.05.4.06.04.036.000	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Luar Jakarta	Jumlah Pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Luar Jakarta	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	12 Kali	12 Kali	176.100.000	140.600.000	(35.500.000)	-	-	16 Kali	400.000.000	berjalan	
4.05.4.06.04.036.000	Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan	Persentase Kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan	Persentase Kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	100%	0%	300.275.000	-	(300.275.000)	-	-	100%	350.000.000	berjalan	
4.05.4.06.04.036.000	Penyelenggaraan Keprotokolan dan pelayanan tamu serta pimpinan daerah	Jumlah Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek	Jumlah Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	24 kali	24 kali	474.775.000	212.608.048	(262.166.952)	-	-	26 kali	1.400.000.000	berjalan	
4.05.4.06.04.036.000	Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai	Jumlah Kegiatan Expo Serumpun Sebalai	Jumlah Kegiatan Expo Serumpun Sebalai	-		Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	1 kali	0 kali	564.580.000	-	(564.580.000)	-	-	1 kali	1.000.000.000	berjalan	
4.05.4.06.04.036.000	Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya daerah	Jumlah Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi	Jumlah Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	7 Kegiatan	0 Kegiatan	602.050.000	12.366.806	(589.683.194)	-	-	7 Kegiatan	1.600.000.000	berjalan	

4.05.4.06.04.036.000	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	3 acara	0 acara	1.378.600.000	2.900.000	(1.375.700.000)	-	-	4 acara	2.100.000.000	berjalan	
4.05.4.06.04.036.000	Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	Jumlah anjungan yang direhabilitasi berat	Jumlah anjungan yang direhabilitasi berat	-		Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	1 Anjungan	0 Anjungan	3.000.000.000	-	(3.000.000.000)	-	-	0 Anjungan	-	berjalan	
	JUMLAH									12.698.483.540	6.144.442.698	(6.554.040.842)				13.837.598.448		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ini merupakan komitmen Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam kurun waktu 1 tahun. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan partisipasi serta koordinasi yang sebaik-baiknya dari semua pihak dan terutama jajaran aparatur Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Perumusan dan penyusunan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tahun 2020 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Renja ini, maka akan dilakukan pembahasan dalam forum OPD maupun Musrenbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan yang belum terakomodir / diakomodir dengan pengurangan pagu anggaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2020 disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ARIE PRIMAJAYA, SE, M.Si
NIP.19751231 200312 1 007